

Bab I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada saat ini merupakan aset yang sangat penting dan berguna dalam kemajuan sebuah organisasi dalam menjaga eksistensinya (Carroll W Frenzel, 2004). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan setiap pelaku bisnis dan organisasi, untuk dapat menciptakan efisiensi serta efektivitas pada bisnisnya. Pada sektor pemerintahan, TIK menjadi sarana bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan di setiap layanan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, Pasal 1, Ayat 1 “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah program penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya”. Pemerintah membangun Arsitektur SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan sebuah layanan pemerintahan yang terintegrasi dengan baik. Dengan penggunaan SPBE dapat memberikan peluang untuk pemerintah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi, terbuka, dan inovatif sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan ditetapkannya program pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah layanan pemerintahan yang terintegrasi dan berkolaborasi dengan baik, setiap instansi pemerintah pada tingkatan Provinsi, Kota dan Kabupaten membuat rencana kerja pembangunan SPBE sebagai program kerja utama. Termasuk Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebesar 48,683 juta jiwa (2018) berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, memperhatikan jumlah penduduknya dengan memberikan layanan pengolahan perumahan rakyat dan pertanahan sebagai salah satu fungsi dasar dari pengolahan pemerintahan yang diatur berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun dari data dokumen *monitoring* dan evaluasi SPBE 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 September 2019, Provinsi Jawa Barat belum mencapai target yang ditentukan seperti yang tergambar pada Tabel I-1, sehingga masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan pada penerapan SPBE.

Tabel I-1 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 – < 3,5	Baik
4.	1,8 – < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Keterangan Tabel

Existing Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat

Target Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat

Tingkat kematangan pelaksanaan SPBE yang digambarkan pada Tabel I-1 merupakan hasil kerangka kerja yang mengukur tingkat kinerja SPBE yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagai Instansi Pemerintahan Pusat maupun Daerah yang menjalankan program SPBE dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi 3 domain yaitu Kebijakan Internal, Tata Kelola dan Layanan SPBE, 7 aspek dan 35 indikator dalam melakukan implementasi SPBE. Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Indeks SPBE yang didapat berdasarkan dokumen *monitoring* dan evaluasi SPBE 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi yaitu 3.12 yang berarti hanya mendapat predikat Baik berdasarkan Tabel I-1.

Dengan mengacu pada target Indeks SPBE yang telah ditentukan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa domain, aspek dan indikator cukup terlaksana dengan baik. Contohnya Pada domain Tata Kelola SPBE terdiri dari 7 indikator yaitu tim pengarah, proses bisnis, rencana induk, anggaran, pusat data, integrasi aplikasi, dan juga penggunaan aplikasi umum, hasil rata-rata yang didapatkan pada domain Tata Kelola SPBE berdasarkan dokumen *monitoring* dan evaluasi SPBE 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 3,9 atau mendapat predikat Sangat Baik. Tetapi pelaksanaannya di organisasi belum optimal. Permasalahan umum yang sering terjadi ialah tidak adanya integrasi antara infrastruktur pendukung yaitu *people*, *process* dan *technology* (TheIMPACTProgramme, 2005), sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara masing-masing bidang yang berada pada dinas terkait.

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok utama yang berada pada lingkup perumahan, permukiman dan pertanahan tentu memerlukan sistem dan data yang terintegrasi untuk memenuhi kegiatan proses bisnisnya. Tetapi kegiatan tersebut menjadi terhambat dan tidak maksimal karena SPBE yang sudah dibuat belum terdapat keterkaitan antar seluruh fungsi baik dari infrastruktur bisnis, data, maupun teknologi. Pada bidang Pertanahan, pengolahan data dan sistem informasi yang berkaitan dengan pertanahan belum optimal dalam penggunaannya untuk menunjang kegiatan proses bisnis pada organisasi.

Dengan permasalahan yang telah disampaikan, solusi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah melakukan perancangan *Enterprise Architecture* (EA) sebagai dasar dalam optimasi implementasi SPBE dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF. *Enterprise Architecture* merupakan master plan dari perencanaan bisnis seperti tujuan, visi, strategi, dan prinsip-prinsip tata kelola, aspek-aspek dari kegiatan bisnis seperti syarat-syarat bisnis, struktur organisasi, proses, dan data, aspek-aspek otomatisasi seperti sistem informasi dan basis data, serta infrastruktur

berbasis teknologi dari bisnis seperti komputer, sistem operasi, dan jaringan (Schekkerman, 2004). Dengan penggunaan EA sebagai dasar dalam perancangan SPBE dapat memberikan solusi berupa perbaikan proses bisnis, migrasi atau perubahan pada data, aplikasi, dan teknologi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rancangan EA yang sesuai dengan standar SPBE pada bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana rancangan cetak biru sebagai acuan pengembangan teknologi sistem informasi geografis yang terintegrasi dalam implementasi SPBE pada bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan tujuan dari penelitian sebagai berikut adalah:

1. Merancang rancangan EA yang sesuai dengan standar SPBE menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM, pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
2. Menghasilkan rancangan cetak biru sebagai acuan pengembangan teknologi sistem informasi geografis yang terintegrasi dalam implementasi SPBE pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan usulan rancangan integrasi antara proses bisnis terhadap arsitektur sistem informasi dan teknologi yang telah dibuat pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

2. Memberikan usulan rancangan induk SPBE instansi pemerintahan baru dalam memenuhi salah satu indikator pada domain Tata Kelola SPBE.
3. Memberikan usulan standarisasi metode yang dapat disesuaikan untuk pembuatan SPBE (*E-Government*) pada pemerintahan pusat dan daerah.
4. Memberikan usulan rancangan pengembangan teknologi sistem informasi geografis yang terintegrasi dalam implementasi SPBE Jawa Barat.

I.5 Batasan Masalah

Dalam melakukan observasi mengenai analisis dan perancangan terdapat beberapa batasan yang menjadi dasar lingkup observasi, sebagai berikut:

1. Proses perancangan EA SPBE menggunakan kerangka kerja TOGAF 9.1 ADM, perancangan EA SPBE dimulai dari fase *Preliminary Phase* hingga *Technology Architecture* sebagai solusi yang diusulkan.
2. Menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 sebagai acuan dasar dalam perancangan EA SPBE di bidang Pertahanan.
3. Pada penelitian ini berfokus data dan informasi yang diberikan oleh Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

I.6 Sistematika Penelitian

Berikut merupakan sistematika penulisan dari penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai dasar pemikiran dari penelitian yang dilakukan. Dimulai dari latar belakang masalah yang diangkat mengenai perancangan *Enterprise Architecture* SPBE hingga memberikan penyaranan solusi untuk perancangan EA SPBE untuk Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya serta kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga membahas arsitektur referensi yang

berisikan pemilihan kerangka kerja yang digunakan dan elemen yang terkait pada penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan data yang digambarkan oleh sebuah model konseptual yang menjelaskan konsep secara terstruktur dari penelitian serta menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bab ini juga berisi sistematika penelitian yang menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini

BAB IV PERSIAPAN DAN IDENTIFIKASI

Bab ini menjelaskan mengenai 2 (dua) fase yang memiliki tujuan yaitu menjelaskan tentang pengumpulan kebutuhan data dan menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, rencana strategis, kondisi aplikasi *existing*, proses bisnis *existing*, dan juga permasalahan *existing*.

BAB V ANALISIS KEBUTUHAN EA

Bab ini menjelaskan kebutuhan analisis dari permasalahan *eksisting* dan perancangan arsitektur target. Kebutuhan perancangan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM yang dimulai dari fase *Preliminary* dan *Business Architecture*.

BAB VI PERANCANGAN EA

Bab ini menjelaskan analisis dari permasalahan *eksisting* dan perancangan arsitektur target. Perancangan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM yang dimulai dari fase *Business Architecture*. hingga *Technology Architecture*.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan mengenai dari hasil analisis dan perancangan pada penelitian tugas akhir serta saran yang diberikan untuk bidang Pertanahan.